

Workshop Sertifikasi Profesi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA Bagi Perangkat Desa, BPD dan PNS di Kecamatan Puding Besar

Ellya Helmud*¹, Chandra Kirana², Fitriyani³

^{1,2,3}ISB Atma Luhur

Jl.Jend Sudirman Kel.Selindung Kec.Gabek Pangkalpinang

e-mail: 1ellyahelmud@atmaluhur.ac.id, 2chandra.kirana@atmaluhur.ac.id,

3fitriyani@atmaluhur.ac.id

Abstrak

Sertifikasi profesi sangat penting untuk mendukung keahlian atau profesi tertentu karena pada era MEA atau Asean Economic Community(AEC) dibutuhkan pekerja yang profesional di bidang masing-masing. Pada era MEA merupakan wadah yang sangat penting untuk kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan. Pekerja bisa dinyatakan kompeten dibidangnya apabila telah lulus sertifikasi profesi dengan dibuktikan adanya sertifikat.untuk itulah dibutuhkan workshop sertifikasi profesi dalam menghadapi MEA 2016. Pada workshop ini peserta diberikan materi tentang langkah-langkah mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Para peserta juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini sehingga kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan lagi.

Kata kunci:sertifikasi profesi, MEA, BNSP

1. PENDAHULUAN

MEA merupakan kepanjangan dari ASEAN Economic Community (AEC). MEA merupakan era baru sebuah perdagangan antar Negara ASEAN yang terdiri dari Negara Brunei Darusalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Dalam era MEA nanti diperlukan sumber daya manusia yang terampil, cerdas dan kompetitif karena akan banyak persaingan yang terjadi baik dari segi budaya, ketenagakerjaan dan juga perdagangan. Dalam hal ketenagakerjaan kita harus mempersiapkan diri dengan menjadi pekerja yang professional karena jika tidak, kita akan kalah bersaing dengan Negara-negara lain.[1]

Untuk meningkatkan skill pekerja dibutuhkan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi bisa diartikan dengan kata lain adalah proses yang secara sistematis dilakukan uji kompetensi tentang profesi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.[2] Uji kompetensi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut.[3] Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018, pemerintah memberikan tugas pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melakukan dan memantau proses pengembangan kompetensi di Indonesia. Lembaga yang sudah mendapatkan izin dari BNSP ada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).[4] Ada 3 standar yang dipakai oleh LSP untuk melakukan uji kompetensi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3), atau standar internasional yang telah memperoleh verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.[5]

Kami berhasil mengadakan “Workshop Sertifikasi Profesi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA bagi Perangkat Desa, BPD dan PNS di Kecamatan Puding Besar”. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan

ditingkat kecamatan dengan melibatkan mahasiswa dan para instruktur yang terdiri dari dosen STMIK Atma Luhur.

Kegiatan workshop ini berjudul Workshop Tentang Sertifikasi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA bagi Perangkat Desa, BPD dan PNS di Kecamatan Puding Besar yang beralamat di Jl. Raya Sungailiat – Puding Besar, Kode Pos 33179, Telp 081373304039. Untuk membantu aktifitas mereka dalam hal mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA bagi perangkat desa, BPD dan PNS yang bermanfaat untuk kita semua dan nantinya dapat di sebarluas ke berbagai desa sehingga masyarakat khususnya di kecamatan puding besar siap untuk menghadapi MEA kedepannya. Workshop ini bagi kami (Institusi STMIK Atma Luhur): sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dimiliki oleh dosen dan mahasiswa sehingga berguna bagi masyarakat luas. Sedangkan bagi Kecamatan Puding Besar bertujuan untuk membekali agar perangkat desa, BPD dan PNS sudah siap untuk menghadapi MEA.

Dengan adanya workshop ini, telah terjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan antara STMIK Atma Luhur dengan Kecamatan Puding Besar. Dengan upaya dan jerih payah, kegiatan workshop dengan judul “Workshop Sertifikasi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA Bagi Perangkat Desa, BPD dan PNS di Kecamatan Puding Besar” berjalan dengan sukses sesuai dengan rencana.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 24 hari dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
05 - 10 Januari 2015	Briefing pengajar	STMIK Atma Luhur
12 Januari 2015	Workshop	Kecamatan Puding Besar
13 - 17 Januari 2015	Pengumpulan Berkas	STMIK Atma Luhur
19 - 21 Januari 2015	Pembuatan Sertifikat	STMIK Atma Luhur
22 - 31 Januari 2015	Pembuatan Laporan Akhir	STMIK Atma Luhur

Tahapan kegiatan pelaksanaan workshop antara lain :[2]

1. Perencanaan

Pada tahap ini, melakukan analisa/observasi dokumen yaitu menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan sertifikasi, menyiapkan materi dan bahan yang akan disampaikan pada saat workshop beserta pelatihan cara mengikuti sertifikasi kompetensi serta menyusun kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta selama kegiatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengajuan proposal ke ISB Atma Luhur.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini dilakukan pada tanggal 12 Januari 2015 yang dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD dan PNS se kecamatan Puding Besar. Materi yang disampaikan antara lain mengenalkan sertifikasi MRA (Mutual Recognition Agreement) serta menjelaskan langkah-langkah mengikuti sertifikasi profesi.

3. Evaluasi

Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan pelaksanaan workshop meliputi kegiatan pembuatan sertifikat dan pembuatan laporan akhir yang akan diserahkan ke bagian LPPM ISB Atma Luhur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berlangsung dengan lancar. Jadwal pelaksanaan pelatihan ini berlangsung sebagai berikut :

Tanggal	: 12 Januari 2015
Tempat	: Aula Kecamatan Puding Besar
Waktu	: 09.00 – 15.00
Hari	: Senin

Peserta pada Workshop Tentang Sertifikasi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA Bagi Perangkat Desa, BPD dan PNS di Kecamatan Puding Besar tersebut berjumlah 40 orang. Yang terdiri dari Perangkat Desa, BPD dan PNS yang ada dilingkungan Kecamatan Puding Besar. Berikut ini daftar tabel peserta workshop di Kecamatan Puding Besar:

Tabel 2. Peserta Workshop

No	Nama Peserta	No	Nama Peserta
1	Albab	21	Pipi Purnama
2	Samsudin	22	Suryani
3	M Nurdin	23	Jamadi
4	Mansor	24	M Hoiri
5	Samsul Bahri	25	Subaryan B
6	Widia	26	Suryani
7	Heliana	27	Isman
8	Umi Kalsum	28	Wisnu
9	Lisa	29	Yunawati
10	Saipul	31	Evana Mayasari
11	Sudirman	32	Siti Nurjanah
12	Hatijah Asnawati	33	Herwin
13	Nani	34	Darmadi
14	Meli Wahyuni	35	Ari Jainal
15	Defvy Guantoro	36	Marbawi
16	Kurnain	37	Bin Okoandi
17	Edi Susanto	38	Hairul
18	Zuhri	39	Herman
19	Nurhidayah	40	Istimiah
20	Samudi		



Gambar 1: Hari Senin, 12 Januari 2015
Peserta Workshop Sertifikasi di Indonesia Untuk Menghadapi MEA Bagi Perangkat Desa, BPD
dan PNS di Kecamatan Puding Besar

Materi yang diberikan pada acara workshop sertifikasi di Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain :

1. Sosialisasi mengenai MEA 2016, pengertian MEA dan apa yang akan terjadi selama MEA ini mulai berlangsung.
2. Sosialisasi sertifikat Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai standar kompetensi pekerja di tingkat ASEAN dinilai masih minim.
3. Sedikitnya ada delapan profesi yang harus mengantongi sertifikat MRA dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kedelapan profesi itu adalah: insinyur, arsitektur, perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, surveyor lahan dan pekerja pariwisata
4. Memberikan langkah-langkah registrasi pendaftaran sertifikat profesi ke BNSP, yang dalam hal ini adalah LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang merupakan lembaga yang sudah mendapatkan izin dari BNSP.
5. Menyebarkan informasi kepada masyarakat se kecamatan Puding Besar mengenai adanya sertifikat profesi untuk menghadapi MEA 2016
6. Tujuan dari sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran formal, non formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.
7. Ada 5 skema sertifikasi berdasarkan jenisnya yaitu :
 - a. skema sertifikasi profesi Kerangka Kualifikasi Nasional
Pada PERPRES Nomor 8 Tahun 2012, berdasarkan jenisnya, sertifikasi profesi berdasarkan level KKNI memiliki tingkat sertifikasi 1 sampai dengan sertifikasi 9.
 - b. skema sertifikasi profesi Kualifikasi Okupasi Nasional
merupakan sertifikasi berdasarkan suatu jabatan kerja pada system industry yang ditetapkan secara nasional dan seharusnya mampu telusur okupasi internasional untuk memastikan skema ini juga portable. Berdasarkan levelnya, dalam skema Kualifikasi Okupasi Nasional terdapat unit asosiasi profesi, unit asosiasi industry dan unit otoritas kompeten.
 - c. skema sertifikasi profesi Paket (Kluster)

merupakan sertifikasi berdasarkan kluster (paket) pekerjaan pada system industry yang ditetapkan secara spesifik untuk tujuan spesifik pula. Dalam skema ini terdiri dari unit-unit kompetensi berbagai level yang sesuai dan persyaratan dasarnya dengan konsensus dalam komite skema.

- d. skema sertifikasi profesi Unit Kompetensi (UK)
merupakan sertifikasi kompetensi berdasar satuan unit kompetensi. Skema unit kompetensi ini lebih murah dibandingkan dengan skema lainnya dikarenakan unit ini memiliki sertifikasi tidak banyak Skema ini telah mendapatkan izin dari BNSP.
- e. skema sertifikasi profesi Profesiensi berbasis Norm.
Yaitu skema yang menggunakan penilaian angka dengan cara mencari indikator kuat dari kriteria dengan melakukan ujian (*examination*) terhadap para peserta. Tujuan dari sertifikasi profesiensi berbasis Norm ini adalah masyarakat yang ahli dibidangnya diberikan kompetensi khusus sesuai dengan keahliannya. Hasil dari uji kompetensi ini adalah berupa pernyataan lulus atau tidak lulus.

4. SIMPULAN

Kegiatan workshop sertifikasi profesi dalam menghadapi MEA berjalan dengan lancar, peserta sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pekerja agar tahu cara mendapatkan sertifikasi profesi

5. SARAN

Selama kegiatan berlangsung, ada beberapa hal yang sebaiknya diperbaiki antara lain materi perlu lebih diditilkan lagi, perlu ada kegiatan lagi agar masyarakat tahu cara langkah-langkah mendapatkan sertifikasi profesi selain dari BNSP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak ISB Atma Luhur yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. G. Prawiyogi and R. A. Toyibah, “Strategi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Model Sertifikasi Kompetensi,” *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, vol. 1, no. 1, pp. 78–86, 2020, doi: 10.34306/abdi.v1i1.103.
- [2] M. A. Nurhadi, “Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik,” *Form. J. Ilm. Pendidik. MIPA*, vol. 1, no. 3, pp. 174–185, 2015, doi: 10.30998/formatif.v1i3.75.
- [3] S. Sudradjat and F. Amyar, “PKM Uji Kompetensi Bidang Keahlian Akuntansi di SMK

- Pembangunan Kota Bogor,” *J. Abdimas Dedik. Kesatuan*, vol. 1, no. 1, pp. 37–42, 2020, doi: 10.37641/jadkes.v1i1.321.
- [4] D. Hermawan, “Profesionalisasi Dan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *J. Adm. Pendidik. UPI*, vol. 5, no. 1, 2007, doi: 10.17509/jap.v5i1.6179.
- [5] A. Adhar, “Peran Sertifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Kedisiplinan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran,” *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 13, no. 1, p. 71, 2013, doi: 10.22373/jiif.v13i1.573.